



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMPER MULIA HARAHAP**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **450463**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 954.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 379 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 461.200.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
6. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 3.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR BEBEK Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 140.600.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	120.148.986
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.217.948.986
III. HUTANG	Rp.	40.464.442
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.177.484.544

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.